

SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN NAGARI  
OLEH DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN  
WILAYAH SUMATERA BARAT

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh :

ANNISA KHAIRANI  
00140135



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2005

No. Reg. 2000/ PK. III/ 08/ 05

No. Alumni Universitas 50805	ANNISA KHAIRANI	No. Alumni Fakultas 5845
<b>BIODATA</b> a) Tempat/ Tgl Lahir: Padang/ 3 Maret 1982 b) Nama Orang tua: Erfan dan Erma Wartini c) Fakultas: Hukum d) Jurusan: Hukum Perdata Ekonomi e) No.BP: 00140135 f) Tanggal Lulus: 30 Agustus 2005 g) IPK: 3,17 h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) Lama Studi : 5 tahun j) Alamat orang tua : Jl. Banuaran Baru Rt 08/ II No. 19 Padang		

**PELAKSANAAN PEMBANGUNAN JALAN NAGARI OLEH DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN WILAYAH SUMATERA BARAT**

**ABSTRAK**

Pelaksanaan pembangunan jalan tidak saja dilaksanakan oleh dinas Prasarana Jalan, tetapi juga oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman, dalam hal ini pembangunan jalan nagari. Dalam praktek di lapangan pembangunan ini dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa (kontraktor), yang sebelumnya telah melewati pelelangan umum dengan cara pasca kualifikasi. Permasalahan yang dibahas yaitu prosedur pelaksanaan pembangunan jalan nagari oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Tanggung jawab Dinas Tata Ruang dan Permukiman Wilayah Sumatera Barat apabila pembangunan jalan nagari tidak sesuai dengan bestek, dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Tata ruang dan Permukiman Wilayah Sumatera Barat dalam pembangunan jalan nagari, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kendala serta cara penyelesaian kendala yang timbul tersebut. Metode penelitian yuridis sosiologis, tehnik sampling *purposive sampling*, metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara. Penelitian yang dilakukan menggambarkan kendala yang timbul pada pelaksanaan pembangunan jalan nagari dan faktor yang mempengaruhi timbulnya kendala tersebut. Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul yaitu melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat serta pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan proyek tersebut. Dalam hal musyawarah ini maka akan didengar keinginan dari kedua para pihak dengan menunjukkan sikap saling menerima pendapat dan keinginan yang didasarkan atas kesukarelaan antara pihak pemegang hak tanah dan pihak yang memerlukan tanah. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan perlunya pengontrolan dari pemerintah daerah terhadap pendirian bangunan yang ada di lingkungannya.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Agustus 2005. Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Penguji :

Tanda Tangan	1.	2.	3.	4.
Nama terang	Zefrizal Nurdin SH., MH	Dahlil Marjon SH., MH	Rustam Ismael SH	Muhammad Hasbi SH., MH

Menyetujui:

Ketua Jurusan

Prof. Dr. Hj. Yulia Mirwati SH. Cn. MH

Nama

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Pelugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas : 5845	Nama	Tanda tangan

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional yang dilaksanakan bangsa Indonesia selama kurun waktu seperempat abad terakhir pada umumnya menitikberatkan pada pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama tercapainya keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, seperti terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat.<sup>1</sup> *pemanfaatan sumber daya alam (ketersediaan sumber daya tenaga kerja) dan SWA ekonomi rakyat di seluruh* Ketersediaan Prasarana Sarana Dasar Pekerjaan Umum (PSD-PU) yang mantap dan andal dengan tingkat penyebaran yang merata dan luas diseluruh tanah air memberikan kemungkinan dan sumbangan yang besar artinya dalam menunjang dan mendukung kegiatan ekonomi, terutama dalam mendayagunakan sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, serta kemampuan kondisi lingkungan secara optimal, selaras, seimbang, untuk lebih merangsang dan mendorong sektor-sektor dalam pembangunan nasional. Salah satu bentuk realisasi dari pembangunan yang dilaksanakan adalah berupa pembangunan proyek-proyek sarana, prasarana yang berwujud pembangunan dan rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran air, perumahan rakyat, maupun perkantoran. Semua itu diusahakan oleh pemerintah untuk menunjang kesejahteraan rakyat.

*Sumber daya alam*  
 Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir

<sup>1</sup> Informasi Peraturan Perundang-undangan Dinas Pekerjaan Umum, 1994, Berdasarkan SK Sek Jend Dinas Pekerjaan Umum Nomor 03/KPTS/SJ/1994, hlm 1.

berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

*Sumber daya alam*  
Proyek pembangunan perumahan dan permukiman penduduk saat ini semakin mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal semakin dirasakan penting. Dalam hal ini pembangunan permukiman dan perumahan belumlah sempurna bila tidak didukung dengan sarana penunjang yang memadai. Salah satunya adalah adanya jalan yang baik dan teratur.

*Sumber daya alam*  
Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai Tujuan Nasional, yang hendak diwujudkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta berlangsung secara terus-menerus. Dalam kerangka itu maka *Sumber daya alam*  
jalan mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional, seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadaan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta dalam jangka panjang terciptanya landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, menuju suatu masyarakat Indonesia yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan:

- a. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Wilayah Sumatera Barat sebagai pengguna jasa melakukan pemilihan penyedia jasa untuk pembangunan jalan desa di Sumatera Barat menggunakan pelelangan umum dengan cara menggunakan pascakualifikasi. Prosedurnya dimulai dengan melakukan penawaran melalui media massa. Setelah dilakukan evaluasi baru dapat diperoleh pemenangnya yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut.
- b. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Wilayah Sumatera Barat pada saat pelaksanaan pembangunan jalan akan melakukan pengawasan, dan bila ditemukan adanya ketidakcocokan dalam pembangunan tersebut, maka akan dimintakan pembongkaran kembali dan melakukan pembangunan ulang disesuaikan dengan bestek.
- c. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman Wilayah Sumatera Barat dalam pembangunan jalan nagari berasal dari masyarakat setempat, yang merasa dirugikan dengan pembangunan jalan tersebut karena sebagian dari lahan yang mereka miliki dijadikan sebagai jalan. Penyebab timbulnya kendala ini adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah tentang pentingnya pengaturan dan penataan dalam pembangunan rumah atau bangunan yang ada di daerah mereka. Selain itu juga kurangnya pengawasan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku;

Asril, HM., *Hukum Bangunan*, Fakultas Hukum Unand, Padang, 1987.

Boerhan, Boerma, *Diktat Hukum Perjanjian*, Fakultas Hukum Unand, Padang, 1990.

Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi, *Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Keppres Nomor 80 Tahun 2003 dan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa konstruksi Oleh Instansi Pemerintah Kepmen Kimprswil nomor 339/KPTS/M/2003*, Jakarta, 2004.

Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Perumahan, *Kumpulan Materi Pedoman Teknik Sebagai Petunjuk Praktis Pelaksanaan Pemugaran Lingkungan Rumah dan Lingkungan desa, Buku II, Pola Tata Letak, fasilitas dan Utilitas Lingkungan dan Penyediaan Bahan Bangunan*, Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_, *Penjelasan Materi Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Sederhana Tidak Bertingkat*, Yayasan LPMB, Bandung, 1981.

Departemen Pekerjaan Umum, *40 Tahun Karya Bakti Departemen Pekerjaan Umum*, Badan Penerbit Pekerjaan Umum, Jakarta, 1985.

Djumialdji, F. X., *Perjanjian Pemborongan*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.

\_\_\_\_\_, *Hukum Bangunan, Dasar-dasar Hukum Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Satrio, J., *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Setiawan, R., *Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994.

Sofyan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

\_\_\_\_\_, *Himpunan Karya Tentang Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982

\_\_\_\_\_, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1992.

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1990.